

MASYARAKAT ADAT dan EKOSISTEM HUTAN^{*1}

Donny Danardono^{**1}

Menonton film *Kinipan* (2021), melalui Basuki di Kinipan, Kalimantan Tengah dan Feri Irawan di Bengkulu, kita seakan diajak masuk wilayah-wilayah yang rusak ekosistemnya dan bertemu dengan masyarakat-masyarakat adat yang bersengketa dengan perusahaan-perusahaan sawit atau penambang batu bara.

Pembabatan ribuan hektar hutan (deforestasi) di Kalimantan dan Sumatra yang semula merupakan habitat bagi beragam binatang dan manusia dan menggantinya dengan perkebunan sawit yang monokultur itu telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan, sosial, dan akhirnya kesehatan. Pembabatan hutan di Sumatra telah menyebabkan punahnya harimau Sumatra dan Orang Utan. Tak ada lagi yang memangsa babi hutan. Jumlah babi hutan meningkat pesat dan mereka menjadi hama bagi tanaman-tanaman pangan penduduk. Babi hutan dalam jumlah besar juga cenderung akan bercacing parasit dalam dirinya. Akibatnya mengkonsumsi babi hutan berbahaya bagi harimau dan manusia.

Pembabatan hutan juga mengakibatkan tanah-tanah yang tak berpohon lagi itu tak bisa segera menyerap air hujan. Maka, saat musim hujan tiba, kampung-kampung warga di sekitar bekas wilayah hutan pun terendam banjir.

Pembabatan hutan juga mengakibatkan masyarakat-masyarakat adat kehilangan habitatnya. Padahal mereka turun-temurun ada di situ. Bahkan sebelum Republik Indonesia ini ada. Maka tak terhindarkan terjadinya sengketa antara masyarakat adat dengan penghuni baru lahan yang hutannya telah dibabat itu.

Barang tentu pembabatan hutan ini seijin pemerintah. Seringkali itu itu demi usaha-usaha para investor minyak sawit, penambangan batu-bara atau emas. Bahkan pemerintah membutuhkan ribuan hektar lahan bekas hutan sebagai *food estate* yang konon untuk mengatasi krisis pangan dunia akibat wabah Covid-19 ini. Tapi kebijakan *food estate* terbukti keliru, karena berhektar-hektar sawah itu hanya ditanami satu jenis tanaman produksi yang menggunakan sarana produksi modern (pupuk buatan dan penyemprot hama) yang mengakibatkan munculnya wereng. Wereng ini menjadi hama yang menghabiskan bulir-bulir padi. *Food estate* pun gagal.

^{*1} dipaparkan sebagai pengantar “Bedah Film Kinipan” yang diadakan oleh Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Walisongo, Sabtu 5 Juni 2021 di <http://meet.google.com/ebp-fqtc-cmn>

^{**1} Donny Danardono adalah pengajar Etika Lingkungan di Program Magister Lingkungan dan Perkotaan [PMLP] Unika Soegijapranata

Pada akhirnya masyarakat dunia menyadari lagi pentingnya hutan sebagai paru-paru dunia. Maka mereka menyelenggarakan kebijakan 'perdagangan karbon' (*carbon trading*). Mereka meminta dan membiayai negara-negara dunia ketiga untuk menghutankan kembali (reforestasi) sejumlah wilayahnya. Sayangnya program penghutanan kembali itu tak diserahkan kepada masyarakat-masyarakat adat, tapi kepada LSM-LSM internasional yang punya cabang dan rekan kerja sesama LSM di berbagai negara atau diserahkan kepada perusahaan-perusahaan konservasi. Maka LSM-LSM dan perusahaan-perusahaan konservasi itu pun sering bersengketa dengan masyarakat-masyarakat adat, karena dalam lahan yang dihutankan kembali itu ada larangan untuk berkegiatan kecuali mengambil hasil hutan (madu hutan) atau pariwisata.

Menurut film ini, pemerintah menyerahkan program penghutanan kembali ke LSM dan perusahaan konservasi, karena pemerintah ingin menarik pajak dari dana-dana Internasional untuk penghutanan kembali itu. Tapi saya juga karena penyerahan program konservasi ke masyarakat adat akan mempersulit investor untuk mengusahakan lahan-lahan hutan itu dikemudian hari.

Film *Kinipan* ini menyayangkan kebijakan penghutanan kembali yang tak melibatkan masyarakat adat. Menurut film ini pelibatan masyarakat adat ini penting, karena mereka telah secara turun-temurun tinggal di hutan. Hutan merupakan habitat mereka. Maka mereka akan merawat ruang hidup itu setulusnya, tidak secara pragmatis seperti LSM dan perusahaan konservasi. Dengan cara ini ekosistem hutan dan ketahanan pangan akan kembali

Namun, film ini kurang memaparkan bagaimana bentuk hubungan organik antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan itu? Kita mungkin bisa memahaminya melalui masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dan masyarakat adat Molo di Timor Tengah.

Masyarakat adat Samin terbentuk saat melawan kebijakan kolonial Belanda dalam penanaman satu jenis tanaman ekspor di wilayah mereka, yaitu pohon jati. Kebijakan ini mengakibatkan tergusurnya sawah-sawah masyarakat. Untuk mempertahankan lahan itu mereka menonjolkan identitas mereka sebagai petani yang beragama Adam (adamah: tanah). Sejak saat itu, di wilayah itu, seorang akan kehilangan identitasnya sebagai Samin jika ia tak lagi bertani. Maka tanah adat dan ekosistemnya (mata air, hutan dan binatang) penting untuk keberlangsungan identitas mereka sebagai petani. Itu sebabnya mereka menolak pabrik semen yang hendak menambang kapur di wilayah mereka. Penambangan kapur itu akan mematikan ratusan mata air di pegunungan Kendheng, mengeringkan sawah-sawah mereka dan menghapuskan identitas mereka sebagai petani.

Masyarakat adat Molo juga mempunyai hubungan organik dengan Gunung Mutis. Dari gunung Mutis ini mereka memperoleh identitasnya sebagai masyarakat adat. Mereka menganggap gunung itu sebagai sumber penghidupan mereka. Di situ mereka berburu, menanam berbagai tanaman pangan, obat, dan pewarna kain tenun. Gunung itu juga merupakan sumber air mereka. Itu sebabnya mereka menjalin hubungan spiritual dengan gunung itu. Mereka memberi nama marga berdasarkan tanah, air, batu, dan pohon yang ada di gunung itu. Maka, di tahun 1990an, mereka habis-habisan melawan dua perusahaan penambang marmer di Gunung Mutis. Perlawanan itu mengancam jiwa mereka. Tapi pada tahun 2010 kedua perusahaan itu menghentikan penambangan marmer itu.

Itu sebabnya saya setuju dengan film Kinipan ini tentang peran penting masyarakat adat sebagai penjaga hutan, karena identitas mereka sebagai masyarakat adat hanya ada jika hutan itu tetap ada. Mereka berbeda dari LSM dan perusahaan konservasi yang hanya bersedia merawat hutan jika biayanya ada.